

ABSTRAK

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan perencanaan, peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan Anggota DPRD dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Tahun 2025 di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan menurut Jimly Asshiddiqie yang meliputi penetapan standar atau rencana pengawasan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, identifikasi penyimpangan atau hambatan, tindakan korektif, dan evaluasi hasil pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur di Dapil I Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan melalui pengawalan aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan reses, kunjungan lapangan, koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), pemantauan progres pembangunan, serta evaluasi terhadap hasil pembangunan. Infrastruktur yang menjadi objek penelitian meliputi rehabilitasi Jalan HZ Mustofa, rehabilitasi jalan di kawasan Empangsari, pembangunan Jembatan Cibunigeulis II dan Jembatan Bantargedang, serta pembangunan drainase di Jalan HZ Mustofa dan Jalan Rumah Sakit. Berdasarkan teori pengawasan Jimly Asshiddiqie, seluruh tahapan pengawasan telah dilaksanakan oleh DPRD. Namun demikian, efektivitas pengawasan belum sepenuhnya optimal, yang ditunjukkan oleh masih adanya keterlambatan realisasi beberapa pembangunan, proses perbaikan infrastruktur yang memerlukan waktu cukup lama, serta masih ditemukannya permasalahan pada hasil pembangunan seperti drainase yang belum mampu menampung debit air secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan yang lebih proaktif, koordinasi yang lebih efektif dengan instansi terkait, serta percepatan tindak lanjut hasil pengawasan agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih optimal, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, DPRD, Pembangunan Infrastruktur

ABSTRACT

The oversight function is one of the primary functions of the Regional House of Representatives (DPRD), aimed at ensuring that regional government policies and programs are implemented in accordance with planning, regulations, and community needs. This study aims to analyze the oversight function of DPRD members in the implementation of infrastructure development in 2025 within Electoral District I of Tasikmalaya City. The study employs Jimly Asshiddiqie's oversight theory, which consists of establishing oversight standards or plans, measuring implementation activities, comparing implementation with predetermined standards, identifying deviations or obstacles, taking corrective actions, and evaluating oversight results. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the DPRD's oversight function in infrastructure development within Electoral District I of Tasikmalaya City has been carried out through monitoring community aspirations during Development Planning Deliberations (Musrenbang) and recess activities, conducting field visits, coordinating with the Department of Public Works and Spatial Planning (DPUTR), monitoring development progress, and evaluating development outcomes. The infrastructure projects examined in this study include the rehabilitation of HZ Mustofa Road, road rehabilitation in the Empangsari area, the construction of Cibunigeulis II Bridge and Bantargedang Bridge, as well as drainage development on HZ Mustofa Road and Rumah Sakit Road. Based on Jimly Asshiddiqie's oversight theory, all stages of oversight have been implemented by the DPRD. However, the effectiveness of the oversight function has not been fully optimal, as indicated by delays in the realization of several development projects, prolonged infrastructure repair processes, and the existence of infrastructure outcomes that have not functioned optimally, such as drainage systems that are still unable to accommodate water discharge effectively. Therefore, more proactive oversight, stronger coordination with relevant agencies, and faster follow-up on oversight findings are required to ensure that infrastructure development becomes more effective, accountable, and responsive to community needs.

Keywords: *Supervisory Function, DPRD, Infrastructure Development, Jimly Asshiddiqie, Tasikmalaya City.*